

# MASALAH PENDIDIKAN DI D I Y, Sebagai Model Mini Permasalahan Pendidikan DI INDONESIA

OLEH : SOEBIJANTO WIROJOEDO

## 1. KONDISI DAERAH

Yogyakarta, dengan 1 Kotamadya dan 4 Kabupaten, memiliki luas 3.193 km<sup>2</sup> dengan 73 Kecamatan dan 556 Desa. Keadaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki luas 3.193 km<sup>2</sup> itu, 20 % persawahan; 38 % tegalan; 27 % pekarangan; 5 % hutan; dan 10 % lain-lain. Pada tahun 1971 - jumlah penduduk 2.488.544 jiwa, dengan kepadatan 780 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedang tahun 1978 jumlah penduduk 2.640.513 jiwa, dengan kepadatan 827 jiwa per km<sup>2</sup>. Selama lima tahun pertambahan penduduk 2.640.513 jiwa dikurangi 2.488.544 jiwa. = 151.969 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk 827-780 = 47 jiwa, setiap tahun rata-rata tingkat penambahan kepadatan penduduk =  $47 : 5 = 9 \frac{2}{7}$  jiwa per km<sup>2</sup>. Kalau 83,6 % diam di desa dan 16,4 % diam di kota, maka tingkat kepadatan penduduk =  $83,6 \% = 83,6/100 \times 9 \frac{2}{7} = 7,56$  jiwa tinggal di desa, sedangkan 2,44 tinggal di kota untuk tiap tahunnya. Bilamana diproyeksi pertambahan penduduk itu per tahun 1,19 %, berarti tiap tahun bertambah 151.969 jiwa (1,19%). Sedangkan rencana transmigrasi + 19.000 kepala keluarga. Kalau satu keluarga dengan 5 jiwa (3 anak + 2 suami/istri) berarti  $5 \times 19.000 \text{ kk} = + 100.000$  jiwa. Sedangkan pertambahan penduduk 151.969 jiwa untuk selama 5 tahun, berarti 1 tahun =  $100.000 : 5 = 20.000$  jiwa. Bilamana tiap bertambah = 151.969 jiwa, dapat berarti penduduk tetap bertambah =  $151.969 - 20.000 = 131.969$  jiwa di Yogyakarta. \*)

Dilihat dari segi manusia baru, belum lagi para pelajar yang membanting kota Yogyakarta untuk belajar di Perguruan Tinggi. Sebagai contoh IKIP YOGYAKARTA tahun 1982 dibanting jiri ± 25.000 pelamar, dengan daya tampung 3055 calon yang

\*)). Buku Pelita IV Bab 12, Hal. 183.

diterima, berarti hanya  $\pm 13\%$  dari pelamar, belum lagi UGM, dan sebagainya, dan sebagainya. Rata-rata Perguruan Tinggi di Indonesia tidak meningkat dayaampungnya.

Belum lagi TK, SD, SMTP, SMTA, dan Akademi ( $\pm 40$  Perguruan Tinggi Swasta) di DIY yang akan memberikan tambahan penduduk yang bersifat konsumtif adanya. Demikianlah kira-kira gambaran penduduk DIY dan masalahnya yang setiap tahun makin bertambah. Apakah problema ini tidak perlu segera diatasi sekurangnya dari segi perencanaan perlu memperoleh perhatian.

## 2. KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT SUMBER POKOK KEHIDUPAN

Menurut catatan data Pelita III, sumber pokok penduduk adalah sebagai berikut.

Petani	= 56 %
Perindustrian	= 22 %
Pedagang	= 12 %
Angkutan	= 1,4 %
Lain - lain	= 8,6 %
<u>T o t a l</u>	<u>=100 %</u>

Separoh penduduk di DIY adalah petani, berarti penduduk - DIY berpenghasilan kecil, karena  $\pm 50\%$  penduduk umumnya petani buruh, atau petani penggarap, bukan kuli (pemilik tanah), mungkin kebanyakan indung tlasar. Maka seyogianya ada pemikiran tentang apa perlu dilakukan  $50\%$  dari penduduk desa tersebut. Tentu harus ada rencana yang cukup matang dan kegiatan crass-sectoral dan keterpaduan semua usaha-usaha mengatasi pemikiran pagi-pagi. Hal ini tentu para pejabat di DIY tidak kurang perhatiannya bagi  $\pm 50\%$  dari penduduk petani jelas tinggal di desa, dan sebenarnya lebih dari itu  $\pm 84\%$  tinggal di desa. Jadi apa yang perlu diperhatikan dengan  $84\%$  penduduk tinggal di desa, prioritas pemikiran di sana ! jelas tentunya.

## 3. APA YANG HARUS KITA LAKUKAN ?

Sebenarnya kondisi DIY ini sebagai salah satu model problema pendidikan saja, belum yang lain yang biasanya hampir senada untuk kota-kota lain di Pulau Jawa. Pendekatan

yang kita gunakan sebagai berikut.

Perencanaan kota dan daerah,  
Pengembangan fisik, dan  
Pendidikan dan usaha-usaha mengatasinya.

a. PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH

Kalau di DIY selalu akan kelebihan penduduk karena besarnya angka kelahiran dibanding dengan pemindahan penduduk (salah satu aspeknya), maka dalam rangka City-planning dan Regional-planning perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Fokus perencanaan untuk mengelola 84 % penduduk yang berada di desa tersebut, 50 % adalah berkehidupan pokok sebagai petani. Bagaimana taraf dan bagaimana tingkat hidup mereka secara pasti, terutama menghadapi ketimpangan demografik tersebut tentunya aspek sosial-pendidikan yang perlu mendapat perhatian, hanya dengan mencerdaskan mereka (anak-anaknya) mereka dapat mencari sumber hidup yang lain yang lebih baik.
- 2) Program Keluarga Berencana ; mungkinkah program ini ditingkatkan hingga sampai pada balanced demographic growth, sehingga rumusnya ( $1 + 1 = 2$ ), bukan ( $1 + 1 = 10$ ), Hal semacam ini akan merupakan suatu kondisi yang ideal untuk suatu daerah seperti Yogyakarta ini. Tidak ada alasan untuk menambah anak karena hanya punya putra dua semua laki laki, atau dua-duanya putri. Terutama rakyat pedesaan, salah satu cara yang lebih efektif adalah listrik masuk desa segera direalisasikan. Tentu saja yang menyangkut aspek hiburan dan bentuk-bentuk penerangan lewat TVRI dan RRI akan lebih efektif terutama yang menyangkut Keluarga Berencana dan usaha-usaha Pembangunan Pemerintah. Memang pada Pelita IV ini, 8 jalur pemerataan dalam bentuk program konkrit (khususnya jalur pendidikan) yang telah kita ketahui tentang rencana Pelita IV untuk menyiapkan gedung SD sebanyak 1000 buah yang menyangkut wajib-belajar bagi anak-anak 6-7 tahun. Tentu saja dipersiapkan juga tentang undang-undang :

Pokok Pendidikan Indonesia,  
Tentang Wajib-belajar,

Perguruan Tinggi, dan  
Konsepsi Sistem Pendidikan Nasional Indonesia.

Masalah tersebut adalah masalah nasional, maka perlu memperoleh perhatian seperlunya.

3) Pengeluaran-pengeluaran non ekonomis.

Rakyat pedesaan khususnya di Pulau Jawa dan juga rakyat DIY, umumnya rakyat di negara berkembang banyak melakukan pengeluaran yang dinilai non ekonomis. Misalnya kenduri, dimana menjelang hari raya tertentu semua penduduk melakukan upacara 'kenduri' yang sering-sering dengan cara mencari pinjaman, dan menambah beban hidup selanjutnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Tidak perlu di brantas secara dratis, namun agak meringankan beban, misalnya dengan cara arisan uang yang dilakukan oleh seseorang, dan frekuensi upacara itu dikurangi. Juga masalah kelahiran anak, dengan sistem selapanan dan sebagainya, hal tersebut merupakan pemborosan yang sudah tidak perlu terjadi, selama 35 hari seseorang melakukan tirakatan yang kadang-kadang orang satu kampung hadir semua, karena kalau tidak hadir dipandang non-sosial. Dalam bentuk lain hampir semua negara berkembang mempunyai aspek non ekonomi yang sama. - Beeby dalam bukunya 'New Strategy in Education in Developing Countries. Apa yang dapat dilakukan oleh perencana pendidikan adalah lewat KKN, KKM, pendidikan masyarakat, penerangan, dan lain-lain memberikan kesadaran untuk berkembang lebih ekonomis dalam tingkah laku anggota masyarakat. Tahap dan sifat rencana tersebut, harus lebih konkrit adanya. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut dapat berupa :

- Penataran P4 (Tap. II/MPR/1978)
- Penataran Kewiraan tentang hak dan kewajiban membela negara (Ps. 30/UUD '45)
- Lewat Lembaga Bimbingan Konseling setiap Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
- Lewat Pendidikan masyarakat, dapat dilakukan oleh Pendidikan masyarakat Pemerintah Daerah/Kanwil Dep. P dan K setempat (DIY)
- Penataran pada ibu-ibu PKK, Hapsari, perkumpulan arisan, dan sebagainya.

- Lewat khotbah-khotbah jum'at, minggu, dan sebagainya, dan lain-lain usaha yang menyangkut kesadaran masyarakat untuk membangun dirinya.

Dalam program pelayanan masyarakat yang berupa program bimbingan Konseling tersebut, dapat disusun program-program :

- bimbingan belajar untuk anak-anak mereka,
- bimbingan keluarga dan perkawinan,
- bimbingan bantuan hukum, penyelesaian tanah, dan lain-lain.

Disamping program Koran Masuk Desa (KMD) yang memuat aspek tersebut, atau pendidikan informal dengan papan-papan yang memberikan penerangan tentang masalah tersebut, termasuk di dalamnya tentang apa yang baik dan tidak baik dilakukan, pelaksanaan dapat diserahkan pada para mahasiswa peserta KKN/KKM dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya dapat disiarkan lewat Program Bangun Desa lewat RRI, TVRI, Surat Kabar, dan lain-lain. Demikianlah sekitar pendekatan masalah pendidikan dilihat dari aspek perencanaan. Banyak usaha semacamnya yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat, namun tidak ada jeleknya pembahasan ini dilakukan.

#### b. PEMBANGUNAN FISIK.

Dalam rangka pembangunan fisik untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kotamadya Yogyakarta, diproyeksikan keluar kota dan bertingkat, baik untuk SMTP, SMTA, juga termasuk kantor pemerintahan, kantor-kantor yang lain, pabrik-pabrik disarankan di luar Kotamadya Yogyakarta yang akan berarti pusat-pusat kepadatan di luar daerah. Dengan kata lain ada beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut ;

- 1) Pusat-pusat perbelanjaan harus sudah mulai dialihkan ke jalan-jalan utama bukan hanya pusat kota (Shopping Centre)
- 2) Sekolah-sekolah Menengah ke-atas sampai Perguruan Tinggi dengan bantuan transportasi yang memadai sudah harus di-perhitungkan.
- 3) Perumahan-perumahan karyawan harus sudah berada di luar -

kota, dengan lokasi km 10 - 12 dari kota, agar banyak mengurangi kepadatan kota Yogyakarta, termasuk kota-kota lain di Indonesia.

- 4) Konsekuensi perbaikan jalan kelas II dan III di Kabupaten harus juga memperoleh perhatian sebagai sarana penunjang.
- 5) Tata-kota, letak shopping centre, kompleks ABRI, kompleks sekolah, kompleks perumahan karyawan harus memperoleh perhatian planeer, dalam arti tata keindahan maupun syarat suatu rumah tempat tinggal yang baik harus secara minimum ditunjang oleh :
  - dekat shopping centre,
  - dekat Rumah Sakit/Puskesmas,
  - dekat sekolah,
  - dekat terminal/transportasi,
 dekat Kantor Pemerintah bila mungkin, dan sebagainya.

#### c. PENDIDIKAN DAN USAHA-USAHA MENGATASI MASALAHNYA

Masalah-masalah pendidikan yang kita hadapi khususnya di DIY adalah :

##### 1) MASALAH KEPADATAN PENDUDUK.

Tahun 1971 jumlah penduduk 2.488.544 jiwa. Kepadatan jiwa per  $\text{Km}^2 = 780$  jiwa. Tahun 1976 jumlah penduduk 2.640.513 jiwa. Kepadatan jiwa per  $\text{Km}^2 = 827$  jiwa. Pertambahan penduduk rata-rata = 1,19 %. Menghadapi masalah seperti ini, aspek pendidikan yang dapat dilihat sebagai masalah adalah :

- a) Selama 5 tahun (1971 - 1976) ternyata kepadatan penduduk bertambah menjadi lebih besar  $(827 - 780) = 47$  jiwa, jadi sekitar 9,4 jiwa per  $\text{km}^2$  setiap tahun. Diperkirakan tahun 1981 menjadi sekitar  $(827 + 47) = 874$  jiwa per  $\text{km}^2$ , bila kita berasumsi bahwasanya keadaan akan tetap dalam usaha menekan arus penduduk yang datang ke Yogyakarta dari Luar, maupun pertumbuhan penduduk sendiri masih tetap angka yang ada.
- b) Penduduk yang datang ke Yogyakarta adalah bersifat konsumtif (pelajar/mahasiswa), walaupun mereka datang membawa biaya, namun relatif habis untuk kebutuhan pembiayaan hi-

dup dan dalam keadaan yang terbatas. Sifat yang dibawa oleh kelompok penduduk tipe ini ialah :

- Konsumtif/bukan produktif.
- Variasi watak asal daerah yang banyak.
- Memenuhi kepadatan untuk tempat tinggal (pemondokan).
- Biaya hidup dan biaya pemondokan cenderung meningkat adanya.
- Mempertinggi kepadatan penduduk Yogyakarta dengan segala eksesnya.
- Meningkatkan kepadatan lalu lintas dengan berjenis-jenis kendaraan dan tentu saja termasuk kebutuhan bahan bakar.

Problem ini memerlukan perhatian dilihat dari aspek pendidikan adalah :

- (1) Pembinaan kesatuan bangsa dan pembinaan generasi muda memerlukan penanganan yang khusus di Yogyakarta (mengingat asal penduduk kelompok remaja) ini hampir dari semua propinsi di Indonesia.
- (2) Menggiatkan Karang Taruna, Student Center, Perpustakaan, tempat hiburan sehat, tempat rekreasi, dan olahraga harus memperoleh perhatian yang khusus.
- (3) Meningkatkan penyediaan tempat-tempat pemondokan yang memenuhi persyaratan, baik tempat tinggal, dan murah untuk ukuran pelajar/mahasiswa.
- (4) Transportasi diantara 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya diperbanyak/diperlancar, karena para pelajar/mahasiswa akan mau mondok agak di tepian kota bila diperkirakan transportasi untuk masuk kuliah/belajar tidak akan menjadi masalah. Sehingga kepadatan kota akan lebih dikurangi, dan relatif biaya mondok di tepian kota lebih murah.
- (5) Penggeseran lalu lintas berat dari pusat kota ke tepi an kota, pembangunan jalan by pass segera direalisasikan. Arus lalu lintas seperti Jakarta - Surabaya, dengan volume angkutan yang berat dapat lewat di daerah-daerah luar kota, seperti Kabupaten Sleman, dan lain-lain.

(6) Dengan Penggeseran lalu-lintas kendaraan berat ke luar kota akan banyak efeknya pada lapangan pendapatan penduduk di tepian jalan raya (bypass). Dengan jalan berjualan, warung, toko, dan lain-lain akan banyak di tepian kota. Hal ini akan dapat merubah kondisi 56 % petani, menjadi lebih besar untuk perdagangan dan ter masuk jasa yang semula hanya 12 % \*) itu. Dan hidup yang berbeda, tentu saja suatu daerah pedesaan, dan akan kena pengaruh lalu lintas antar kota besar tentu akan menimbulkan problema-problema sosial baru. 'Nilai' kota besar akan segera mewarnai daerah pedesaan yang penduduknya masih murni. Ini problema yang sebenarnya di perhatikan oleh Dinas Sosial/ Penmas dan lain-lain baik kotamadya Yogyakarta, maupun kabupaten semua (khususnya Sleman).

## 2) MASALAH DAYA TAMPUNG.

Hampir semua Perguruan Tinggi Negeri tidak meningkat daya tampungnya. Problema sama, ruang kuliah tidak ada atau hampir tidak ada penambahan yang berarti. Rata-rata daya tampung sekitar + 10 % kuliah di IKIP Yogyakarta, UGM, Akademi - Akademi yang ada (AMI, ASTI, dan lain-lain). Sebenarnya hal ini juga menjadi tugas Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang relatif sekarang ini banyak meningkatkan prasarana yang antara lain ; UII, Atma Jaya, Sanata Dharma, Sarjana Wiyata, Janabadra, Akub, dan lain-lain. Hanya SPP relatif lebih tinggi dari sekolah negeri, sebagai misal IKIP YOGYAKARTA SPP hanya 19.000 rupiah, setahun, sedang beberapa PTS telah menjadi berkisar dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 300.000,- dalam satu tahun. Cukup Lux dan mahal bagi anak-anak di DIY. Dilihat dari daya tampungnya PTS di Yogyakarta jauh lebih besar. Rata-rata daya tampung di PTS di Yogyakarta dapat meningkat lebih besar dibanding dengan yang sekarang, karena banyak PTS yang ternyata belum pernah dapat berkisar antara 10 % sampai dengan 15 % atau lebih atas dasar jumlah mahasiswa tahun-tahun sebelumnya.

---

\*) . Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) 1979/1980 - 1983/1984 Buku IV RI hal. 183 no. 1.



### 3) PERGURUAN TINGGI NEGERI LEBIH MENARIK ATAU MURAH ?

Masalah student enrolment di kota Yogyakarta selalu besar jumlahnya. Sebagai misal IKIP YOGYAKARTA 19.700 calon mahasiswa baru (1981) menjadi 24.800 calon mahasiswa baru (1982). Hal ini dikarenakan faktor daya tampung yang relatif tidak meningkat maupun alasan lain, seperti ;

- a) Para calon mahasiswa baru yang gagal tes PP I, IV dan masuk PTS, baik telah duduk di tahun ke 2/tingkat II dan sebagainya, pada masa tes PP I atau IV berusaha turut serta, sehingga akan menambah calon mahasiswa baru. Disamping akan menimbulkan pemborosan dimana SPP yang telah dibayar mahasiswa, maka hal itu juga menambah waktu belajar 1, 2, malah 3 tahun akan sia-sia, karena kalau mereka lulus PP I/IV akan mengulang untuk tahun pertama lagi. Hal ini perlu memperoleh penanganan baik Rektor-rektor PTS maupun orang tua mahasiswa sendiri. Karena PTS banyak yang telah memiliki mutu yang baik dan berstatus yang lebih tinggi, disamakan, diakui, dan sebagainya-dan sebagainya. Dengan demikian dapat ditekan keinginan meninggalkan kuliah ditingkat yang telah memakan waktu 1 atau 2 tahun, juga akan mengurangi jumlah calon mahasiswa baru yang di Perguruan Tinggi Negeri. Penerangan yang intensif diperlukan khusus oleh PTS tentunya.
- b) Produktivitas sukar diperhitungkan !  
 Dengan mahasiswa meninggalkan Perguruan Tinggi untuk pindah di Perguruan Tinggi yang lain (swasta ke negeri) akan mengurangi dan sukar memperhitungkan produktivitasnya. Belum lagi administrasi Perguruan Tinggi yang ditinggalkan juga akan mengalami kesulitan adanya.
- c) Jumlah calon mahasiswa baru.  
 Jumlah pendaftar mahasiswa baru di setiap Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta selalu akan meningkat terus, karena harus menampung para mahasiswa yang telah duduk di PTS walau tidak berarti seluruhnya. Namun dapat dilihat hal tersebut, disamping banyaknya lulusan baru SMTA yang baru, baik dari kota Yogyakarta sendiri maupun dari kota lain banyak membanjiri kota Yogyakarta.

#### 4. KESIMPULAN.

Hasil analisis pendidikan ini dapat disimpulkan :

- a. Pertambahan penduduk = 1,19 %, berarti tiap tahun  $9 \frac{2}{7}$  jiwa, berarti pertambahan penduduk = 151.969 jiwa, yang berarti bahwa akan berakibat pada segi sosial-pendidikan, yang menyangkut aspek pertambahan penduduk setiap tahun.
  - b. Perencanaan akan tata kota dan penyaluran kegiatan kota banyak manfaat bagi keharmonisan tata penggunaan kota.
- 

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku Pelita I, II, III, dan IV tahun 1979/1980 - 1983/1984  
Hal. 183 - 193.

Soebijanto Wirojoedo - Ilmu Pendidikan hal. 12 - 20.  
Penerbit Yayasan Pancasila 1979.

Philip Combs - The World Educational Crisis - Unesco.

---